

Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/ Kota Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Candra Ragil

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional

Korespondensi : candraragil@sttnas.ac.id

ABSTRAK

Setiap daerah yang melaksanakan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih baik jika diikuti dengan pemerataan pendapatan atau hasil-hasil pembangunan. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengurangan ketimpangan antar wilayah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat disparitas/ ketimpangan spasial antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dari tahun 2013-2016. Ketimpangan wilayah dapat diketahui dengan menggunakan metode Indeks Williamson. Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, Perekonomian Provinsi DIY cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dapat dilihat dari PDRB per kapita yang semakin meningkat, tetapi persoalan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/ kota masih menjadi permasalahan di Provinsi DIY. Walaupun ada kecenderungan semakin menurun dari tahun ke tahun, tetapi penurunan sangat kecil.

Kata kunci: Ketimpangan; Ekonomi; Regional

ABSTRACT

Every regional development has the aim of increasing prosperity and equitable welfare of the population. Economic growth will be better if followed by equal distribution of income. One measure of the success of development in the economic can be seen from the growth of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the reduction of inequality between regions. The purpose of this study was to determine the level of spatial disparity between districts / cities in DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Province from 2013-2016. Regional inequality can be known by using the Williamson Index method. Based on the calculation of the Williamson Index, DIY economy tends to increase every year can be seen from the increasing per capita GRDP, but income inequality between districts/ cities is still a problem in DIY. Although there is a tendency to decline from year to year, the decline is very small.

Keyword : Inequality; Economy; Regional

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam merencanakan suatu wilayah, aspek ekonomi merupakan satu elemen penting yang harus diperhatikan. Bagaimana penduduk yang tinggal di dalam daerah tersebut dapat secara keseluruhan dan utuh meningkat pendapatan serta kesejahteraannya melalui hasil-hasil pembangunan fisik. Tidak hanya peningkatan pendapatan saja, melainkan juga penyebarannya yang juga merata. Apabila suatu daerah tidak mengalami ketimpangan spasial (*spatial disparity*) dalam hal perekonomian, maka daerah tersebut sudah menjadi daerah yang baik. Jika suatu daerah mengalami ketimpangan spasial yang tinggi, perlu diselidiki apa yang menjadi penyebabnya, mengapa, dan apa solusi yang dapat diwujudkan melalui hasil-hasil perencanaan ke depan.

Setiap daerah yang melaksanakan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih baik jika diikuti dengan pemerataan pendapatan atau hasil-hasil pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang juga diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan atas dasar harga konstan. Pembangunan ekonomi modern, tidak lagi menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan PDB sebagai tujuan akhir, melainkan pengurangan (atau dalam bentuk ekstrimnya penghapusan) tingkat kemiskinan yang terjadi, penanggulangan ketimpangan pendapatan serta penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja produktif.

Ketimpangan wilayah dapat diketahui dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson dihitung menggunakan PDRB dan jumlah penduduk. Hasil perhitungan apabila indeks mendekati 0 artinya tidak adanya ketimpangan antar wilayah sedangkan indeks mendekati 1 artinya sangat timpang.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat disparitas/ ketimpangan spasial antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dari tahun 2013-2016.

1.3. Tinjauan Pustaka

a. Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional membahas tentang pembatasan pembatasan wilayah ekonomi dari suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia di setiap wilayah ekonomi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi menganalisa suatu wilayah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi yang beragam yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Analisa ekonomi regional pada hakekatnya membahas mengenai kegiatan perekonomian ditinjau dari segi sudut penyebaran kegiatan ekonomi ke berbagai lokasi dalam suatu *economic space* atau ruang ekonomi tertentu, misalnya dalam suatu negara atau suatu propinsi. Tetapi disamping itu analisa ekonomi regional akan melibatkan dirinya pula dalam menganalisa ekonomi suatu daerah ditinjau secara sektoral dan secara makro.

b. Ketimpangan Wilayah

Tujuan pembangunan ekonomi regional (bersifat multidimensional) adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan (*disparity*), dan pengangguran (Todaro, 2000). Salah satu masalah dalam perekonomian yaitu disparitas spasial adalah salah satu ukuran hasil pembangunan yang diukur meningkatnya hasil pembangunan (*welfare*) yang didekati dari besaran pendapatan per kapita. Disparitas spasial terjadi karena adanya ketimpangan pendapatan per kapita antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Menurut pandangan Williamson (1965) dalam Delis (2008) pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua wilayah. Pada tahap awal, proses pembangunan cenderung terkonsentrasi dan terpolarisasi pada area pusat suatu negara. Penyebarannya ke wilayah pinggiran dan sektor-sektor yang relatif lemah hanya terjadi secara subsequent. Konsekuensi dari keberadaan dua bentuk kecepatan pembangunan yang berbeda tersebut adalah meluasnya jurang antara wilayah pada fase awal pembangunan ekonomi di suatu negara, namun kemudian berkurang ketika pendapatan nasional mencapai tingkat tertentu. Ada beberapa faktor yang menentukan ketimpangan antar wilayah, antar lain yaitu (Sjafrizal, 2008): a) Perbedaan kandungan sumberdaya alam b) Perbedaan kondisi demografis c) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa d) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah e) Alokasi dana pembangunan antar wilayah. Akibat dari perbedaan tersebut, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Maka tidak mengherankan jika pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*development region*) dan wilayah terbelakang (*underdevelopment region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

c. Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang awalnya ditemukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studinya pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Williamson (dalam Sutarno, 2003) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Metode ini diperoleh dari perhitungan pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah.

2. METODE PENELITIAN

Ukuran ketimpangan wilayah dapat diukur dengan perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per

daerah. Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus indeks Williamson yaitu:

$$W_i = \frac{\sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2}{n}}}{Y} \cdot \frac{f_i}{n}$$

Keterangan :

- W_i = Indeks ketimpangan wilayah provinsi
 Y_i = PDRB per kapita masing-masing kabupaten/ kota
 Y = Total PDRB per kapita provinsi
 f_i = Jumlah penduduk masing-masing kabupaten/ kota
 n = Jumlah penduduk provinsi

Disparitas spasial yang terjadi di suatu daerah dapat dilihat dari nilai W_i yang didapatkan dari perhitungan rumus Indeks Williamson, dengan kriteria sebagai berikut :

- $W_i = 0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata
- $W_i = 1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna)
- $W_i \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata
- $W_i \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Menurut Sjafrizal (2012) Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson yang dikemukakan oleh Williamson (1965). Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah pada waktu tertentu.

3. HASIL DAN ANALISIS

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antar wilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antar wilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY digunakan indeks Williamson.

Indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai indeks Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Jika nilai indeks Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Besar kecilnya ketimpangan PDRB Provinsi DIY memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan setiap kabupaten/ kota di Provinsi DIY. Berikut ini adalah proses perhitungan indeks Williamson di Provinsi DIY tahun 2013-2016 yang berdasarkan data BPS Provinsi DIY:

Tabel 1. PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) 2010 Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2013-2016 (dalam Miliar Rupiah)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1	Kulonprogo	5742	6004	6282	6581
2	Bantul	14139	14851	15589	16378
3	Gunungkidul	10177	10640	11152	11697
4	Sleman	25367	26713	28098	29574
5	Kota Yogyakarta	20240	21308	22393	23538
Jumlah		75665	79516	83514	87768

Sumber: BPS DIY 2017

Berdasarkan data PDRB ADHK di Provinsi DIY tahun 2013-2016, terlihat bahwa semua kabupaten/ kota mengalami peningkatan jumlah PDRB dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan perekonomian di tiap daerah, walaupun nilainya berbeda-beda. Jumlah PDRB tertinggi yaitu Kabupaten Sleman, kemudian Kota Yogyakarta di peringkat kedua. Banyaknya kegiatan ekonomi terutama

kegiatan ekonomi perkotaan yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah.

Di sisi lain PDRB terendah ditempati oleh Kabupaten Kulon Progo. Tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun tercatat paling rendah dibandingkan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi DIY. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena mata pencaharian mayoritas penduduk di Kabupaten Kulon Progo masih bertumpu pada sektor pertanian, sedangkan produktivitas pertanian semakin menurun seiring menurunnya kualitas lingkungan seperti berkurangnya kesuburan tanah, perubahan iklim, berbagai bencana, menurunnya luas lahan pertanian dan lain-lain.

Sedangkan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul PDRB nya lebih baik dibandingkan Kabupaten Kulon Progo walaupun masih tertinggal dibandingkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul banyak digalakkan berbagai macam kegiatan pariwisata, hal tersebut yang turut mendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten tersebut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2013-2016 (fi)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1	Kulonprogo	403179	407709	412198	416683
2	Bantul	947072	959445	972511	983527
3	Gunungkidul	700191	707794	715282	722479
4	Sleman	1141733	1154501	1167481	1180479
5	Kota Yogyakarta	402679	407667	412704	417744
	Jumlah	3594854	3637116	3680176	3720912

Sumber: BPS DIY 2017

Menurut tabel jumlah penduduk di Provinsi DIY, tiap kabupaten/ kota mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman. Di samping wilayahnya yang luas, Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang menarik untuk investasi karena dekat dengan Kota Yogyakarta, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman cukup pesat dan hal ini menjadi daya tarik warga dari luar daerah untuk datang ke Sleman. Selain itu, di Sleman banyak terdapat perguruan tinggi sehingga hal tersebut mahasiswa dalam jumlah besar datang ke Sleman untuk kuliah.

Jumlah penduduk terendah adalah Kota Yogyakarta pada 2013 dan 2014, tetapi pada 2015 dan 2016 jumlah penduduk Kota Yogyakarta meningkat cukup banyak sehingga yang terendah adalah Kabupaten Kulon Progo. Walaupun Kota Yogyakarta luas wilayahnya paling sempit, tetapi Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Kota Yogyakarta menyebabkan jumlah penduduk meningkat signifikan.

Tabel 3. PDRB per Kapita (Rp) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2013-2016 (Yi)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1	Kulonprogo	14241813	14726190	15240249	15793781
2	Bantul	14929171	15478740	16029639	16652314
3	Gunungkidul	14534606	15032622	15591054	16190090
4	Sleman	22217979	23138135	24067201	25052542
5	Kota Yogyakarta	50263361	52268150	54259227	56345513
	Jumlah (Y)	116186930	120643838	125187369	130034240

Sumber: Analisis Peneliti, 2018

Nilai PDRB per kapita diperoleh dengan cara PDRB tiap kabupaten/ kota dibagi dengan jumlah penduduk tiap kabupaten/ kota. Mengacu pada tabel perhitungan PDRB per kapita, tertinggi adalah Kota Yogyakarta kemudian Sleman di urutan kedua. PDRB per kapita Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi karena wilayahnya yang terletak di perkotaan sehingga banyak tersedia lapangan kerja terutama di bidang perdagangan dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan usaha di bidang pertanian.

Di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul masih banyak penduduk yang mata pencaharian di sektor pertanian dengan lahan yang sempit sehingga produktivitasnya rendah, ditambah tingkat pendidikan yang lebih rendah, maka akan kesulitan mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian.

Tabel 4. Hasil Pengurangan PDRB per Kapita Tiap Kabupaten/ Kota dengan PDRB per Kapita Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2013-2016 ($Y_i - Y$)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1	Kulonprogo	-101945117	-105917648	-109947120	-114240459
2	Bantul	-101257759	-105165097	-109157730	-113381926
3	Gunungkidul	-101652325	-105611215	-109596315	-113844150
4	Sleman	-93968951	-97505703	-101120168	-104981697
5	Kota Yogyakarta	-65923569	-68375687	-70928142	-73688727

Sumber: Analisis Peneliti, 2018

Untuk mendapatkan hasil perhitungan indeks Williamson, proses selanjutnya adalah dengan menghitung PDRB per kapita tiap kabupaten/ kota dikurangi dengan PDRB per kapita Provinsi DIY. PDRB per kapita tiap kabupaten/ kota diberi kode Y_i , sedangkan PDRB per kapita Provinsi DIY diberi kode Y , sehingga rumusnya adalah $Y_i - Y$. Karena PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo merupakan yang paling rendah, maka hasil pengurangannya dengan PDRB Provinsi menghasilkan nilai yang paling negatif daripada kabupaten/ kota lain.

Tabel 5. Hasil Kuadrat dari Pengurangan PDRB per Kapita Tiap Kabupaten/ Kota dengan PDRB per Kapita Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2013-2016 $\{ (Y_i - Y)^2 \}$

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1	Kulonprogo	10392806885838400	11218548165023100	12088369280598900	13050882424020800
2	Bantul	10253133766982500	11059697676039000	11915410076052900	12855461168454200
3	Gunungkidul	10333195108777800	11153728746506000	12011352349985800	12960490424855700
4	Sleman	8830163762913460	9507362028343490	10225288357768900	11021156797538300
5	Kota Yogyakarta	4345916960091600	4675234615937170	5030801334631600	5430028432350110

Sumber: Analisis Peneliti, 2018

Setelah nilai $Y_i - Y$ diperoleh, selanjutnya hasilnya dikuadratkan, atau menghitung dengan formula $(Y_i - Y)^2$. Hasil perhitungan $(Y_i - Y)^2$ dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 6. Hasil Pembagian Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten/ Kota dengan Jumlah Penduduk Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2013-2016 (f_i / n)

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1	Kulonprogo	0.11215448	0.11209678	0.11200496	0.11198410
2	Bantul	0.26345214	0.26379279	0.26425665	0.26432417
3	Gunungkidul	0.19477592	0.19460308	0.19436081	0.19416718
4	Sleman	0.31760205	0.31742215	0.31723516	0.31725528
5	Kota Yogyakarta	0.11201539	0.11208523	0.11214246	0.11226925

Sumber: Analisis Peneliti, 2018

Tabel 6 menampilkan hasil pembagian jumlah penduduk tiap kabupaten (f_i) dibagi dengan jumlah penduduk Provinsi DIY (n) dari tahun 2013-2016.

Tabel 7. Hasil Perkalian $(Y_i - Y)^2$ dengan (f_i / n) tahun 2013-2016 $\{ (Y_i - Y)^2 \times (f_i / n) \}$

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016
1	Kulonprogo	116559906818320	1257563149982950	1353957430493630	1461491387350270
2	Bantul	2701210091693190	2917468575868150	3148726411039120	3398009186088320
3	Gunungkidul	2012657597891380	2170550041407650	2334536210116730	2516501911805310
4	Sleman	2804478113303760	3017846823990380	3243820370878020	3496520249659540
5	Kota Yogyakarta	486809616071396	524024768573578	564166451280537	609625220226563
Jumlah					
$\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n$		9170755325778040	9887453359822710	10645206873808000	11482147955130000
$\sqrt[2]{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}$		95764061	99435674	103175612	107154785
Jumlah PDRB per kapita (Y)					
		116186930	120643838	125187369	130034240
$w_i = \frac{\sqrt[2]{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i / n}}{Y}$					
		0.824224037	0.824208484	0.824169504	0.824050537

Sumber: Analisis Peneliti, 2018

Berikutnya adalah mengalikan nilai tabel 5 di tiap kabupaten/ kota $\{ (Y_i - Y)^2 \}$ dikalikan dengan nilai tabel 6 di tiap kabupaten/ kota (f_i/n) . Hasil perkalian tersebut ditampilkan di tabel 7 $\{ (Y_i - Y)^2 \times (f_i/n) \}$. Setelah mendapatkan nilai $\{ (Y_i - Y)^2 \times (f_i/n) \}$ di tiap kabupaten/ kota, proses selanjutnya adalah dari hasil masing-masing kabupaten/ kota, dijumlahkan semuanya $\{ \sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i/n \}$, kemudian hasilnya diakar kuadrat $\{ \sqrt[2]{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i/n} \}$ dan dibagi jumlah PDRB per kapita Provinsi DIY (Y), sehingga diperoleh nilai Indeks Williamson $\{ w_i = \frac{\sqrt[2]{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i/n}}{Y} \}$

Selama periode penelitian tahun 2013-2016, angka indeks Williamson menunjukkan angka yang signifikan. Indeks Williamson per tahun dari 2013-2016 menunjukkan angka lebih dari 0,824 ($> 0,5$). Hasil perhitungan sebesar ini menunjukkan telah terjadi ketimpangan antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY yang sangat tinggi. Perekonomian Provinsi DIY cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dapat dilihat dari PDRB per kapita yang semakin meningkat, tetapi persoalan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/ kota masih menjadi permasalahan di Provinsi DIY. Seperti pendapatan Kabupaten Kulon Progo jika dibandingkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, maka terlihat terdapat ketimpangan yang cukup besar. Walaupun ada kecenderungan semakin menurun dari tahun ke tahun, tetapi penurunan sangat kecil tetap di angka yang lebih besar dari 0,824. Dengan demikian pemerintah Provinsi DIY perlu merespon hal ini dengan melakukan upaya-upaya yang lebih serius dalam membangun infrastruktur dan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dan investasi secara lebih merata.

Pada tahun 2013-2016 di Provinsi DIY terjadi ketimpangan distribusi yang tinggi yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang tidak merata. Faktor-faktor penyebab ketimpangan antara lain adalah adanya migrasi penduduk produktif yang memiliki skill/ terdidik ke kota untuk dapat memperoleh pekerjaan dengan upah/ gaji yang lebih besar, investasi cenderung berlaku di daerah perkotaan karena faktor pemasaran, kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya perekonomian di perkotaan.

Menurut Sjafrizal (2012), beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu: (1) Perbedaan kandungan sumber daya alam. Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. (2) Perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. (3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah

ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. (4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatannya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. (5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah. Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, antar kabupaten/ kota di Provinsi DIY menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Perekonomian Provinsi DIY cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dapat dilihat dari PDRB per kapita yang semakin meningkat, tetapi persoalan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/ kota masih menjadi permasalahan di Provinsi DIY. Walaupun ada kecenderungan semakin menurun dari tahun ke tahun, tetapi penurunan sangat kecil tetap di angka yang lebih besar dari 0,824.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arsyad, Lincolin. 2002. *Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua)*. Yogyakarta: BPF.
- [2] BPS. 2017. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2017*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka.
- [3] Budiono (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama Cetakan Keenam*. Yogyakarta: BPF.
- [4] Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional, Terjemahan Paul Sitohang*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- [5] Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah-Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- [6] Muta'ali., Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPF UGM
- [7] Richardson, Harry W, 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- [8] Sakarov, Ogi Dani. 2017 *Identifikasi Potensi Perkembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Sleman dalam Konteks Urban-Rural Linkage*. Yogyakarta: STTNAS Yogyakarta.
- [9] Samuelson, Paul; William Nordhaus. 2002. *Economics, Edisi 17th International Edition*. Singapura: McGraw Hill.
- [10] Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press.
- [11] Sjafirzal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [12] Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [13] Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [15] Todaro, Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.